

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geopark Natuna merupakan salah satu kawasan yang menyimpan kekayaan geologi, ekologi, dan budaya yang sangat berharga di bagian utara Provinsi Kepulauan Riau. Terletak di antara gugusan pulau yang membentang di Laut Natuna Utara, wilayah ini dikenal dengan formasi batuan granit berusia ratusan juta tahun, tebing-tebing granit megah di Pulau Bunguran Besar, serta keragaman *geosite* yang memiliki nilai ilmiah tinggi (Asmara et al., 2021). Geopark Natuna memiliki lima belas warisan geologi (*geoheritage*) yang meliputi Tanjung datuk, Tanjung Ba'dai, Air Mali, Bukit Kapur, Pulau Senua, Gunung Ranai, Tanjung Senubing, Gunung Gundul, Batu Kasah, Pulau Akar, Bukit Sekunyam, Pulau Semiun, Pulau Setanau, Batu Catur, dan Goa Lubang Hidung Pantai Pasir Pondok. Keunikan warisan geologi tersebut berpadu dengan budaya masyarakat melayu pesisir yang hidup selaras dengan alam, menjadikan kawasan ini bukan hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga nilai sosial-budaya yang penting (Harryanto et al., 2025).

Geopark Natuna salah satu Geopark Nasional Indonesia yang memiliki potensi geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya yang signifikan. Posisi strategis Natuna sebagai wilayah perbatasan menjadikan kawasan ini secara substantif layak untuk memperoleh pengakuan internasional. Namun meskipun telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional dan menjalankan berbagai program

pengembangan, hingga saat ini Geopark Natuna belum memperoleh status UNESCO Global Geopark kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki kawasan dengan keberhasilan memperoleh pengakuan normatif di tingkat global.

Geopark Natuna tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan wilayah yang berlandaskan pada tiga pilar utama: konservasi, edukasi dan pembangunan berkelanjutan. Konsep geopark menempatkan suatu wilayah sebagai *living laboratory* yang mengintegrasikan penelitian ilmiah, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal. Secara global, geopark berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan 11 tentang kota komunitas berkelanjutan, tujuan 13 tentang aksi iklim, dan tujuan 15 tentang perlindungan ekosistem darat (Haryono et al., 2021). Dengan demikian, Pengembangan Geopark Natuna memiliki dimensi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan (Hutabarat, 2023a).

Geopark selain memiliki potensi ekologis dan kultural, Geopark Natuna juga memiliki arti strategis secara geopolitik yaitu letaknya berada di perbatasan utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, menjadikannya kawasan penting dalam konteks kedaulatan negara, ketahanan wilayah, dan diplomasi lingkungan. Pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) tidak hanya meningkatkan reputasi Natuna sebagai destinasi geowisata berkelanjutan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dimata dunia melalui jejaring internasional di bidang konservasi dan geopark (Kardiman et al., 2022).

Upaya pengembangan secara resmi dimulai sejak penetapan Natuna sebagai Geopark Nasional pada 30 November 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI). Sejak saat itu, pemerintah daerah bersama Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) telah melaksanakan berbagai program, seperti inventarisasi *geoheritage*, pemetaan *geosite*, penyusunan dokumen nominasi UNESCO Global Geopark (UGGp), kegiatan edukasi geologi, pelatihan pemandu geowisata, pengutan promosi, hingga festival geopark. Berbagai instansi nasional seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta komunitas lokal turut terlibat dalam pengembangan tersebut. Namun demikian, hingga kini Geopark Natuna masih dalam proses memperoleh pengakuan UNESCO Global Geopark. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki dengan kesiapan dalam memenuhi standar pengelolaan UNESCO (Ramzis & Puspita, 2024).

Geopark Natuna juga memiliki kesenjangan dalam aspek tata kelola kelembagaan yang belum sepenuhnya terkoordinasi, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, integrasi geopark dalam kebijakan pembangunan daerah yang belum menyeluruh, serta proses internalisasi nilai konservasi dan edukasi yang belum merata (Sambodo et al., 2020). Koordinasi antaraktor masih bersifat sektoral, sedangkan norma-norma geopark belum sepenuhnya menjadi praktik keseharian dalam perilaku sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik (Widodo, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan menuju UNESCO Global Geopark (UGGp) tidak hanya membutuhkan strategi teknis, tetapi juga transformasi norma dan nilai di tingkat lokal (Choirunnisa et al., 2022).

Dalam konteks inilah, Teori Siklus Hidup Norma yang diperkenalkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) menjadi kerangka analitis yang sangat relevan. Teori ini menjelaskan proses perkembangan norma internasional melalui tiga tahap: *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*;

Pada tahap *norm emergence*, norma diperkenalkan oleh *norm entrepreneurs*, seperti UNESCO, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Natuna, tahap ini tercermin dari penetapan sebagai Geopark Nasional, pembingkai isu geopark sebagai kebutuhan pembangunan berkelanjutan, serta upaya advokasi oleh agen-agen perubahan di tingkat lokal maupun nasional.

Tahap berikutnya adalah *norm cascade*, yaitu penyebaran norma melalui sosialisasi, jaringan kebijakan, kerja sama antarlembaga, serta dorongan reputasi. Pada tahap ini, aktor-aktor nasional dan daerah mulai menyesuaikan diri dengan standar UNESCO, melakukan pelatihan penyelarasan *geosite*, memperkuat kelembagaan pengelola geopark, dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor. Tahap ini ditandai oleh meningkatnya komitmen pemerintah daerah, lembaga riset, pelaku wisata, dan masyarakat dalam mengadopsi prinsip-prinsip geopark.

Tahap terakhir adalah *norm internalization* yakni ketika norma UGGp tidak lagi dianggap sebagai tuntutan eksternal, tetapi telah menjadi bagian dari sistem nilai, kebijakan, serta perilaku masyarakat dan aktor kelembagaan. Pada tahap ini, prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam SOP pengelolaan *geosite*, regulasi daerah, kurikulum pendidikan, hingga budaya

masyarakat. Tahap ini juga mencerminkan kesiapan penuh Natuna untuk memperoleh pengakuan resmi sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

Pendekatan Siklus Hidup Norma memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis bagaimana norma UGGp diperkenalkan, disebarkan, dan diinternalisasi pada konteks Geopark Natuna. Pendekatan ini membantu melihat pengembangan geopark secara holistik, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi keberlanjutan norma. Melalui analisis ini, strategi percepatan dapat dirumuskan dengan lebih komprehensif, mulai dari penguatan advokasi awal, penciptaan dorongan legitimasi, hingga melibatkan masyarakat dalam internalisasi nilai geopark (Yuliawati et al., 2020).

Meskipun Geopark Natuna telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional sejak tahun 2018 dan memiliki potensi geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang sangat tinggi, hingga saat ini kawasan tersebut belum memperoleh pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kawasan dengan pemenuhan standar UNESCO, terutama pada aspek tata kelola kawasan, koordinasi antar-stakeholder, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, internalisasi nilai-nilai geopark, serta implementasi norma internasional dalam pengelolaan kawasan di tingkat lokal. Dengan kata lain, potensi sumber daya yang dimiliki Geopark Natuna belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan kelembagaan dan implementasi tata kelola yang sesuai dengan standar UNESCO. Permasalahan inilah yang menjadi isu utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses percepatan Geopark Natuna menuju

UNESCO Global Geopark dijalankan melalui penerapan dan internalisasi norma-norma internasional yang ditetapkan UNESCO.

Penelitian ini memandang bahwa strategi percepatan pengakuan Geopark Natuna sebagai UNESCO Global Geopark membutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani kesenjangan antara potensi dan pengelolaan. Meskipun Natuna memiliki kekayaan geologi dan budaya yang luar biasa serta dukungan program pengembangan yang terus dilakukan, namun proses menuju UGGp belum berjalan optimal karena lemahnya internalisasi norma geopark dalam tata kelola dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, Penelitian ini penting untuk mengkaji strategi percepatan melalui Siklus Hidup Norma, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang sistematis dan berkelanjutan mengenai bagaimana norma geopark diperkenalkan, disebarkan, dan dinternalisasi dalam konteks lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis adalah Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengakuan Geopark Natuna sebagai UGGp melalui pemahaman terhadap tahapan Siklus Hidup Norma?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi percepatan Geopark Natuna sebagai bagian dari *UNESCO Global Geopark* (UGGp) melalui tahapan dalam Siklus Hidup Norma yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembentukan, penyebarluasan, serta internalisasi norma-norma geopark yang

mencakup nilai konservasi geodiversity, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah serta perilaku sosial masyarakat Natuna. Perumusan strategi tersebut didasarkan pada pemahaman komprehensif terhadap dinamika sosial, kelembagaan, dan normatif yang berkembang di lapangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi geopark dengan menggunakan Siklus Hidup Norma, yang masih jarang diterapkan dalam konteks pengelolaan kawasan berkelanjutan di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dinamika pembentukan norma lingkungan dan tata kelola berbasis nilai (*value-based governance*).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, Badan Pengelola Geopark Natuna, dan Komite Nasional Geopark Indonesia dalam merancang kebijakan serta strategi percepatan pengakuan UGGp yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.